

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KONSEP DAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan untuk dijadikan bahan kajian penelitian, namun terdapat beberapa masalah yang timbul dari penelitian tersebut. Berdasarkan penelusuran penelitian sejenis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rachmat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010, penelitian yang berjudul *Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan antara Pembiayaan Multifinance Syariah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal International Finance (FIF)*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perbandingan laba yang diperoleh FIF syari'ah terhadap jumlah pembiayaan motor adalah sebesar 15% dari total pembiayaan motor konvensional.<sup>1</sup>
2. Hasmiati, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2015, penelitiannya berjudul *Pengaruh Beban Operasional Terhadap Laba Bersih Pada PT BPRS Al-Ma'soem*. Berdasarkan uji statistika yang dilakukan, variabel Beban Operasional memiliki hubungan positif dengan hasil analisis regresi sederhana  $Y = 4,645 + 0,443 X$  dan memiliki hubungan sedang dengan hasil pengujian korelasi 0,570, serta berdasarkan pengujian koefisiensi determinasi sebesar 32,5%. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji t

---

<sup>1</sup> Rachmat, *Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan antara Pembiayaan Multifinance Syariah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal International Finance (FIF)*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

menyatakan bahwa  $t_{hitung} (2,194) < t_{tabel} (2,228)$  artinya Beban Operasional terhadap Laba Bersih pada BPRS Al-Ma'soem memiliki pengaruh negatif tapi signifikan.<sup>2</sup>

3. Firda Resti Fauzia, tentang *Pengaruh Beban Promosi dan Beban Tenaga Kerja terhadap Laba Tahun Berjalan PT. Bank Victoria Syari'ah Periode 2014-2016*. Hasil penelitian ini adalah, untuk mengetahui pengaruh beban promosi terhadap laba tahun berjalan. Dari perhitungan koefisien korelasi yang didapat sebesar -0.222 artinya hubungan antara Beban Promosi dengan Laba Tahun Berjalan tergolong kategori lemah dan menunjukkan hubungan yang negatif atau berbanding terbalik. Kemudian dengan menggunakan koefisien determinasi menunjukkan bahwa R-Square sebesar 0.0493 atau sama dengan 4.93% hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada Laba Tahun Berjalan di Bank Victoria Syari'ah dijelaskan oleh Beban Promosi. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.512 nilai ini lebih besar dari probabilitas 0.05 ( $0.512 > 0.05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Variabel Beban Promosi memiliki  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  sebesar -0.683 yang kemudian dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  yang diperoleh dari tabel distribusi  $t$  dengan kebebasan 9 dan taraf signifikan sebesar 5% atau 0.05 sehingga  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  ( $-0.683 < 2.26216$ ) maka dapat dirumuskan secara parsial Beban Promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Tahun Berjalan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fransisca Ernawati, *Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Dengan Perputaran Persediaan Sebagai Variabel Pemoderasi*, (Jurnal: STIESIA Surabaya, 2015)

<sup>3</sup> Firda Resti Fauzia, *Pengaruh Beban Promosi dan Beban Tenaga Kerja terhadap Laba Tahun Berjalan PT. Bank Victoria Syari'ah Periode 2014-2016*. (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

4. Regina Nurani, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2018, penelitiannya berjudul *Pengaruh Beban Komisi dan Beban Pemasaran dan Laba Bersih Perusahaan PT.Asuransi Sinar Mas Unit Syari'ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel beban pemasaran bernilai negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hasil pengujian dengan menggunakan analisis Korelasi *Pearson Product Moment* menunjukkan hasil nilai koefisien sebesar -0,128. Ini artinya hubungan antara beban pemasaran dengan laba bersih tergolong dalam kategori “sangat lemah”. Sedangkan analisis Koefisien Determinasi menunjukkan sebesar 0,016 atau 1,65%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 1,65% perubahan laba bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syari'ah dipengaruhi oleh beban pemasaran. Selain itu, nilai signifikan koefisien korelasi (uji t) sebesar 0,691. Nilai ini lebih besar dari probabilitas 0,05 ( $0,691 > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Beban pemasaran memiliki thitung sebesar -0,409 yang kemudian dibandingkan dengan ttabel yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan derajat kebebasan 10 dan taraf signifikan yaitu sebesar 5% atau 0,05 sehingga diperoleh perbandingan antara nilai thitung dan ttabel ( $-0,409 < 2,228$ ) yang artinya secara parsial beban pemasaran tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.<sup>4</sup>
5. Siti Masitoh, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2018, tentang *Pengaruh Beban Promosi dan Beban bonus wadiah terhadap Laba Tahun Terjalan pada PT Bank BRI Syari'ah*. Metode penelitian yang

---

<sup>4</sup> Regina Nurani, *Pengaruh Beban Komisi dan Beban Pemasaran terhadap Laba Bersih Perusahaan PT.Asuransi Sinar Mas Unit Syariah*. (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

digunakan adalah analisis deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana, korelasi *pearson product moment*, koefisien determinasi, dan uji signifikansi menggunakan uji t. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji t menyatakan bahwa thitung laba tahun berjalan sebesar 1,272. Sedangkan hasil t tabel sebesar 2,228. Maka perbandingan thitung dan ttabel menjadi  $1,272 < 2,228$ . Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pengaruh Beban Promosi terhadap Laba Tahun Terjalan pada PT Bank BRI Syariah menggunakan uji t menyatakan bahwa beban promosi terhadap laba tahun terjalan tidak terdapat pengaruh yang signifikan.<sup>5</sup>

**Tabel 2.1**  
**Kajian Terdahulu**

Nomor	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Rachmat (2010), " <i>Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan antara Pembiayaan Multifinance Syariah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal International Finance (FIF)</i> "	Penelitian berupa perbandingan Tidak meneliti Beban Promosi, Beban Umum dan Administrasi dan Beban Umum dan administrasi	Meneliti <i>Multi Finance</i> Syariah
2.	Hasmiati (2015), " <i>Pengaruh Beban Operasional terhadap Laba Bersih pada PT. BPRS AL-Ma'some</i> "	Tidak meneliti Beban Promosi dan Beban Umum dan administrasi	Meneliti Laba

Dilanjutkan

<sup>5</sup> Siti Masitoh, *Pengaruh Beban Promosi dan Beban bonus wadiah terhadap Laba Tahun Terjalan pada PT Bank BRI Syariah*. (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

Lanjutan tabel 2.1

3.	Firda Resti Fauzia (2018), " <i>Pengaruh Beban Promosi dan Beban Tenaga Kerja terhadap Laba Tahun Berjalan PT. Bank Victoria Syari'ah Periode 2014-2016</i> "	Tidak meneliti Beban Umum dan administrasi	Meneliti Beban dan Laba Tahun Berjalan
4.	Regina Nurani (2018), " <i>Pengaruh Beban Komisi dan Beban Pemasaran terhadap Laba Bersih Perusahaan PT.Asuransi Sinar Mas Unit Syari'ah</i> "	Tidak meneliti Beban Umum dan administrasi	Meneliti Beban Pemasaran dan Laba
5.	Siti Masitoh (2018), " <i>Pengaruh Beban Promosi dan Beban Bonus Wadiah Terhadap Laba Tahun Terjalan pada PT. Bank BRI Ssyari'ah</i> "	Tidak meneliti Beban Umum dan administrasi	Meneliti Beban dan Laba Tahun Terjalan

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengambil tinjauan pustaka dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta milik Rachmat tahun 2010, dengan penelitian yang berjudul *Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan antara Pembiayaan Multifinance Syariah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal International Finance (FIF)*. Dari skripsi tersebut memiliki kesamaan objek penelitian yaitu meneliti *multi finance syari'ah*.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung milik Hasmiati, tentang *Pengaruh Beban Operasional Terhadap Laba Bersih Pada PT BPRS Al-Ma'soem*, karena memiliki kesamaan dalam penelitian ini yaitu tentang beban dan laba. Selanjutnya skripsi milik Firda Resi Fauzia yang berjudul *Pengaruh Beban*

*Promosi dan Beban Tenaga Kerja terhadap Laba Tahun Berjalan PT. Bank Victoria Syari'ah Periode 2014-2016*, karena memiliki kesamaan meneliti tentang beban dan laba tahun berjalan.

Kemudian selanjutnya skripsi milik Regina Nurani penelitian yang berjudul *Pengaruh Beban Komisi dan Beban Pemasaran terhadap Laba Bersih Perusahaan PT.Asuransi Sinar Mas Unit Syari'ah* skripsi tersebut memiliki kesamaan yaitu meneliti beban pemasaran dan laba. Selanjutnya skripsi milik Siti Masitoh dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Pengaruh Beban Promosi dan Beban bonus wadiah terhadap Laba Tahun Terjalan pada PT Bank BRI Syari'ah*, skripsi tersebut memiliki kesamaan yaitu meneliti beban dan laba tahun berjalan.

Dari semua penelitian terdahulu terdapat perbedaan yaitu tidak ditemukannya variabel penelitian Beban Umum dan Administrasi serta obyek yang diteliti yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance Unit Syari'ah. Belum ada studi penelitian yang berkaitan dengan yang dimaksudkan penulis maka pada skripsi inilah penelitian diperlengkap.

## **B. Konsep dan Teori**

Dalam konsep dan teori akan membahas mengenai manajemen keuangan syari'ah, beban pemasaran, beban umum dan administrasi serta laba tahun berjalan, berikut pembahasannya:

## 1. Manajemen Keuangan Syari'ah

### a. Pengertian Manajemen Keuangan Syari'ah

Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno yaitu *ménage-ment*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Mary Parker Follet menyatakan bahwa Manajemen dapat diartikan lebih dekat pada seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, sedangkan menurut Ricky W. Griffin manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan Idarah. Secara istilah sebagian pengamat mengartikan idarah (manajemen) sebagai aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien.<sup>6</sup> Manajemen pada teori syari'ah memiliki dua pengertian diantaranya sebagai ilmu dan sebagai rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan.<sup>7</sup>

Adapun pengertian Manajemen keuangan sering didefinisikan sebagai cara merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, mengendalikan, mencari, dan menyimpan dana atau uang bagi sebuah lembaga atau perusahaan.<sup>8</sup> Adapun pengertian Manajemen Keuangan Syari'ah adalah sebuah kegiatan manajerial

---

<sup>6</sup> Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet 1, 2018), hlm. 16

<sup>7</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 19

<sup>8</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5

keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari'ah.<sup>9</sup> Pengertian Manajemen Keuangan Syari'ah secara keseluruhan adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip Syari'ah dalam agama Islam.<sup>10</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syari'ah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari'ah, kegiatannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perusahaan.

#### **b. Landasan Hukum Manajemen Keuangan Syari'ah**

Adapun landasan hukum mengenai manajemen keuangan syari'ah terdapat pada Al- Qur'an dan Al- Hadits sebagai berikut:

##### 1. Al- Qur'an

- a) Setiap harta yang diperoleh terdapat hak orang lain

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyaat 51; 19).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ayi Safrudin, *Manajemen Keuangan syariah*, dalam <http://ekonomi.kompasiana.com>. diakses tanggal 10 Mei 2018

<sup>10</sup> Agus Gunawan, *Manajemen Keuangan Syariah*, dalam <http://www.mag.co.id/manajemen-keuangan-syariah/>. Diakses tanggal 10 Oktober 2018

<sup>11</sup> Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al Jumanatul 'Ali*, (Garut: J-Art, 2004), hlm. 521



b) Setiap perbuatan akan dimintakan pertanggung jawabannya

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ  
الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ  
أَسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

Dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Quran Ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang sebelumnya". dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadap kan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah Berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah Karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman". (QS. As Sabaa' 34; 31)<sup>12</sup>

## 2. Al- Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،  
وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>13</sup>

Prinsip-prinsip manajemen keuangan syari'ah yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Al-hadits yang disebutkan diatas diantaranya :

1. Setiap transaksi harus didasari sikap saling ridha atau atas dasar suka sama suka di antara dua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau didzalimi;
2. Penegakan prinsip keadilan (*justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (*kurs*), dan pembagian keuntungan;

<sup>12</sup> Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 47

<sup>13</sup> Masdar Helmy, *Sunan Ibnu Majah*, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 2012), hlm. 13

3. Prinsip larangan riba, serta transaksi harus terhindar dari praktik spekulasi, *gharar, tadlis dan maysir*;
4. Transaksi tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.

### c. Unsur-unsur Manajemen Keuangan Syari'ah

Manajemen merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Terkait dengan manajemen di dalamnya terdapat unsur-unsur manajemen keuangan syari'ah diantaranya:

#### 1. Perolehan dana

Perolehan dana dalam manajemen keuangan syari'ah harus memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syari'ah, seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah* dan lain-lain. Aktivitas perolehan dana tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti riba, gharar, judi dan lain sebagainya.

#### 2. Prinsip investasi

Aktivitas yang kedua yaitu berkenaan dengan prinsip investasi dana syari'ah. Di dalam investasi harus memperhatikan prinsip bahwa fungsi uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.

### 3. Penggunaan dana

Penggunaan dana didalam manajemen keuangan syari'ah dilakukan untuk hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Dana tersebut sebisa mungkin digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dianjurkan seperti infaq, waqaf, dan shadaqah.

Selain unsur-unsur yang telah disebutkan diatas, didalam manajemen terdapat pula empat fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R Terry sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah suatu persiapan yang dibuat lebih awal didalam usaha untuk mengembangkan suatu lembaga. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan dalam hubungan perencanaan yang dianggap sebagai tindakan persiapan di masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan di masa sekarang.

Perencanaan memiliki fungsi meliputi menetapkan tujuan organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan suatu hirarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. fungsi perencanaan meliputi menetapkan tujuan organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan suatu hirarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.

---

<sup>14</sup> Stephen P Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi 8*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hlm. 3

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

adalah usaha untuk mewujudkan kerjasama antar manusia yang terlibat. Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang, tugas, alat-alat, tanggung jawab atau wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pada pokoknya pengorganisasian adalah proses pembagian kerja, sistem kerja sama, sistem hubungan antar personal yang terlibat dalam suatu organisasi.

## 3. Penggerakan/ Pelaksanaan (*Actuating*)

*Actuating* adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam suatu lembaga, jika hanya ada perencanaan atau organisasi saja tidak cukup. Untuk itu dibutuhkan tindakan atau *actuating* yang konkrit sehingga dapat menimbulkan aksi. Untuk mencapai sukses terbesar dalam *actuating*, orang-orang didalamnya harus senantiasa bersikap obyektif dalam penentuan dan penggunaannya. *Actuating* berhubungan erat dengan sumberdaya manusia yang pada akhirnya merupakan pusat aktivitas-aktivitas jalannya manajemen.

## 4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilakukan, menilainya dan mengoreksinya, dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Setelah tujuan-tujuan ditetapkan, rencana-rencana dirumuskan, pengaturan struktural digambarkan,

orang-orang dipekerjakan, dilatih, dan di beri motivasi masih ada kemungkinan terjadi sesuatu yang keliru. Maka untuk memastikan semua urusan berjalan seperti seharusnya, manajemen harus memantau kinerja organisasi. Kinerja yang sebenarnya harus ditinjau dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat penyimpangan yang cukup berat tugas manajemen untuk mengembalikan organisasi itu pada jalurnya. Pemantauan, perbandingan, dan kemungkinan mengoreksi inilah yang diartikan dengan fungsi *controlling*/ pengawasan.

#### **d. Tujuan Manajemen Keuangan Syari'ah**

Secara umum karakteristik tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan kepada pemegang saham perusahaan. Memaksimalkan keuntungan ini dapat dilihat dari dua kondisi. Pertama, memaksimalkan keuntungan neto perusahaan dalam kondisi penuh kepastian. Kedua, memaksimalkan keuntungan neto perusahaan dalam kondisi ketidakpastian.<sup>15</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa tujuan perusahaan sama dengan tujuan utama manajemen, yaitu maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari keputusan manajerial harus mempertimbangkan risiko dan waktu yang terkait dengan perkiraan laba per saham untuk memaksimalkan harga saham perusahaan.<sup>16</sup> Para ahli keuangan merumuskan tujuan perusahaan adalah:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mohammad Muslich, *Manajemen Keuangan Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 3

<sup>16</sup> Eugene F. Brigham Joel F. Houston, *Dasar-Dasar Manajemen keuangan, diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto dari judul Asli "Essentials of Financial Management"*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 1

<sup>17</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen*, hlm. 8

1. Memaksimalkan nilai perusahaan;
2. Maksimalisasi laba;
3. Menciptakan kesejahteraan bagi *stakeholder*;
4. Menciptakan citra perusahaan;
5. Meningkatkan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perusahaan meliputi maksimalisasi nilai dan *profit* perusahaan, menciptakan kesejahteraan bagi *stakeholder*, menciptakan citra perusahaan, serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Adapun tujuan dari manajemen keuangan syari'ah adalah untuk mencapai kebaikan (*maslahah*) kepada masyarakat. Manajemen keuangan syari'ah tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan juga tidak dilarang.

## 2. *Multi Finance* Syar'iah

### a. Pengertian *Multi Finance* syari'ah

*Multi Finance* atau Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>18</sup> Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga

---

<sup>18</sup> Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kedua*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2001), hlm. 281

pembiayaan.<sup>19</sup> *Multi Finance* syari'ah atau yang sering disebut lembaga pembiayaan syari'ah adalah salah satu lembaga pembiayaan bukan bank yang bertugas pada ruang lingkup pembiayaan penyediaan dana atau barang modal yang aktivitasnya sesuai dengan prinsip islam.

#### **b. Landasan Hukum *Multi Finance* syari'ah**

Landasan hukum merupakan tempat berpijak atau titik ukur dalam melaksanakan kegiatan. Begitu pun dengan *Multi Finance* atau lembaga pembiayaan memiliki landasan hukum yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip ketentuan hukum dalam kegiatan operasional perusahaan, terdapat beberapa landasan hukum diantaranya:

1. Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 yang diundangkan pada 7 Agustus 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Peraturan ini mulai berlaku pada 7 Oktober 2012;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : /PMK.010/2001 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomer: PER-03/BL/2007 adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

1. Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan: *Ijarah; Ijarah Muntahiya Bittamlik*; Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujah*;
2. Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkan: *Murabahah; Salam*; atau *Istishna'*;
3. Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syari'ah;
4. Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syari'ah.

Adapun landasan hukum *Multi Finance* yang tertera pada Al- Qur'an diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (QS. An- Nisa'(4) ayat 29).<sup>20</sup>

Landasan hukum *Multi Finance* dalam kaidah Fiqih:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83

<sup>21</sup> Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, edisi kedua, Jakarta: BI-MUI, 2003



Maksud kaidah di atas ialah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh dilakukan, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, kerja sama (*mudharabah atau musyarakah*), perwakilan ataupun sewa guna usaha dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

### c. Kegiatan Usaha *Multi Finance* syari'ah

Terdapat beberapa kegiatan usaha yang termasuk kedalam perusahaan *Multi Finance* (lembaga pembiayaan) diantaranya:

#### 1. Anjak Piutang Syari'ah

Anjak piutang (*factoring*) adalah transaksi pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek penjual kepada perusahaan anjak piutang, kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan anjak piutang. Sedangkan yang dimaksud dengan anjak piutang syari'ah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah. Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujah*. *Wakalah bil Ujah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 360

## 2. Pegadaian

Pegadain syari'ah bisa disebut juga dengan *rahn*. merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam dengan menjaminkan barangnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Pegadaian syari'ah menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syari'ah. Pelaksanaan pegadian syari'ah biasanya dalam bentuk kerjasama bank syari'ah dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syari'ah, selain itu ada pula bank yang menjalankan kegiatan pegadaian syari'ah sendiri.<sup>23</sup>

## 3. Usaha Kartu Plastik Syari'ah

Pada dasarnya, kartu plastik adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sebagai transaksi atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan di samping untuk melakukan penarikan uang tunai. Kartu plastik dalam perkembangannya juga telah diakomodasi oleh lembaga keuangan syari'ah khususnya dalam Fatwa DSN-MUI No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syari'ah Charge Card dan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syari'ah Card*. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 54, yang dimaksud dengan *Syari'ah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah. Kartu plastik dapat berupa kartu kredit, kartu debit, ATM, dan *Charge Card*. Dalam prinsip syari'ah

---

<sup>23</sup> Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 32

penggunaan kartu plastik menggunakan tiga akad, antara lain akad *kafalah*, akad *qard* dan *ijarah*.

#### 4. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)

Pembiayaan konsumen syari'ah adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>24</sup> Kegiatan usaha ini menggunakan prinsip syari'ah dengan akad *murabahah*.<sup>25</sup>

#### 5. *Leasing* Syari'ah

*Leasing* atau yang sering disebut Sewa guna usaha secara syari'ah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syari'ah.<sup>26</sup>

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang dimaksud dengan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan demikian, sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa.

<sup>24</sup> Dadang Husen Sobana, *Manajemen*, hlm.31

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, hlm 379

<sup>26</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, hlm. 394

Sedangkan yang dimaksud Sewa guna usaha (*leasing*) syari'ah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syari'ah.<sup>27</sup>

Dalam setiap transaksi *leasing* terdapat 5 pihak yang berkepentingan, diantaranya:<sup>28</sup>

- 1) *Lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri dari beberapa perusahaan. *Lessor* merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal.
- 2) *Lessee* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.
- 3) *Supplier* adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.
- 4) Bank terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor* terutama dalam mekanisme *leverage lease* dimana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank.
- 5) Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*.

---

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, hlm. 394

<sup>28</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga*, hlm 530-539

Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah haruslah memiliki landasan hukum sebagai acuan pelaksanaan kegiatan operasionalnya, berikut adalah landasan hukum mengenai *leasing* syari'ah:

1) Al- Qur'an

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Qs. Al-Qashash:26)<sup>29</sup>

2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. Berisi tentang Rukun dan Syarat akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Ketentuan, dan Hal-hal yang dilakukan jika terjadi perselisihan;

3) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

senin, 10 Desember 2007 menerbitkan 2 peraturan tentang leasing syari'ah yaitu:

- a. Peraturan Ketua Bapepam-LK No Per-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah;
- b. Peraturan Ketua Bapepam-LK No Per-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.

<sup>29</sup> Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 388

Usaha *leasing* syari'ah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu berdasarkan akad *ijarah* dan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-Tamlik*<sup>30</sup>. Maka lembaga *leasing* syari'ah ini memiliki dua jenis usaha diantaranya *finance lease* dan *operating lease*, berikut penjelasannya:<sup>31</sup>

#### 1. *Finance Lease*

*Finance lease* merupakan Pembiayaan yang memberikan hak kepada *lessee* untuk memiliki barang modal tersebut sesuai dengan harga *residual* atau nilai sisa barang tersebut.<sup>32</sup> Didalam *finance lease* mencakup beberapa tipe diantaranya *sale type lease*, *direct financial lease*, *sale and lease back* dan *leverage lease*.

##### a. *Sale Type Lease*

Dalam hal ini *lessor* merupakan *dealer* atau pabrikan yang menggunakan *leasing* sebagai salah satu jalur pemasarannya. Dengan tipe ini transaksi yang dilakukan akan menghasilkan laba penjualan.

##### b. *Direct Financial Lease*

Merupakan bentuk *finance lease* yang dibiayai langsung oleh *lessor*. Metode ini disebut dengan *full fayout leasing*. *Lessor* membiayai sepenuhnya dari *leaser property* yang bersangkutan.

##### c. *Sale And Lease Back*

Merupakan model transaksi sewa dengan perjanjian *lessee* menjual barang yang sudah dimilikinya kepada *lessor*. Setelah menjadi pemilik barang tersebut secara sah, *lessor* me-lease-kanya kembali pada *lessee* tadi. *Lessee*

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, hlm. 351

<sup>31</sup> Herlan Firmansyah & Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah*, (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2014), hlm. 164

<sup>32</sup> Ade Dan Edia, *Bank & Lembaga*, hlm. 252

melakukan ini karena memerlukan tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya.

d. *Leverage Lease*

Merupakan bentuk *leasing* yang lebih kompleks, terdapat tiga pihak didalamnya terdiri dari *lessor*, *lessee* dan ada pula *credit provider* atau *debt participant* yang membiayai sebagian besar *lease property*. *Lessee* melakukan penawaran *equipment* menurut yang dikehendaki dan melakukan penawaran harga tetapi *lessor* hanya menanggung sebagian kecil dari pembiayaan *lease property*.

Pembiayaan ini menggunakan akad Ijarah Munthahiyah Bittamlik. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Landasan syari'ah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang alijarah *al- Muntahiyah bi al-Tamlik* atau *al-ijarah wa al-Iqtina*.

2. *Operating lease*

*Operating lease* merupakan pembiayaan tanpa memberikan hak opsi kepemilikan kepada *lessee* untuk memiliki barang modal tersebut. Pihak *lessee* hanya membayar sewa guna barang modal tersebut selama jangka waktu

tertentu.<sup>33</sup> Pembiayaan ini menggunakan akad ijarah. Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syari'ah akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

Dalam Sewa Guna Usaha Syari'ah, *Muajjir* merupakan sebutan bagi pemberi sewa (*lessor*), sedangkan *Musta'jir* sebutan bagi Penerima Sewa (*lessee*). Mekanisme biasanya dilakukan pada *leasing* syari'ah adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Pihak *lessee* melakukan negoisasi dengan pihak *supplier* dan memilih jenis barang modal yang dibutuhkan;
2. Pihak *lessee* menghubungi perusahaan *leasing* atau pihak *lessor* dan melakukan negosiasi atas pilihan barang modal dari *supplier* tertentu;
3. Pihak *lessor* melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut, terutama terhadap kemampuan keuangan *lessee* yang terkait dengan kewajiban pembayaran sewa perbulannya;
4. Pihak *lessor* maupun pihak *supplier* dapat menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank jika ada permohonan dari pihak *lessee* atau apabila mereka kekurangan dana untuk memenuhi permohonan *lessee* tersebut;
5. Pihak *lessor* melakukan kontrak pembelian barang modal kepada *supplier*;
6. Pihak *supplier* segera mengirimkan barang kepada *lessee*;

---

<sup>33</sup> Ade Dan Edia, *Bank & Lembaga*, hlm. 253

<sup>34</sup> Ade Dan Edia, *Bank & Lembaga*, hlm. 250-252



7. Setelah barang diterima, pihak *lessee* menandatangani tanda penerimaan barang dan menyerahkannya kembali kepada pihak *supplier*. Transaksi *Ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan jual beli. Namun, perbedaan terletak pada obyek transaksinya, pada *Ijarah* obyeknya adalah jasa;
8. Pihak *supplier* menyerahkan tanda penerima barang yang telah ditandatangani oleh pihak *lessee* kepada *lessor*. Tanda terima barang merupakan salah satu bukti kepemilikan dan pemindahan kepemilikan ke pihak *lessor*. Pihak *lessor* membayar pembelian barang modal tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah. Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir/lessor*) dengan syarat kecelakaan atau bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*, bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat *musta'jir* (*lessee*), maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri;<sup>35</sup>
9. Pihak *lessee* membayar biaya *leasing* secara periodik kepada *lessor* sesuai dengan harga yang telah disepakati;
10. Pada akhir sewa, pihak *lease* dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Kegiatan seperti ini dikenal dengan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* yaitu akad *ijarah* yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan objek pada waktu tertentu;

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 122

11. Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan.<sup>36</sup>

### 3. Analisis Laporan Keuangan

#### a. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Secara harfiah analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan keuangan. Didalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk pekaranya dan sebagainya). Sedangkan laporan keuangan adalah *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi laporan keuangan yang menjadi informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan, laporan keuangan ini juga sebagai pertanggungjawaban *accountability*, sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122-123

<sup>37</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 201

Adapun pengertian analisis laporan keuangan adalah penelaah tentang hubungan dan kecenderungan atau *trend* untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan.<sup>38</sup>

Dengan menganalisis data finansial dari tahun ketahun, dapat diketahui kelemahan dan kekuatan dari perusahaan tersebut serta hasil yang dianggap sudah cukup baik. Hasil analisis sangat penting bagi penyusunan rencana yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, diusahakan agar dapat menyusun rencana yang lebih baik ditahun yang akan datang dan hasil yang dianggap sudah cukup baik harus tetap dipertahankan untuk waktu –waktu mendatang.

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu proses penyelidikan atau penelaahan suatu laporan akhir proses akuntansi agar diketahui kondisi keuangan perusahaan untuk bahan evaluasi dan pengambilan keputusan agar keadaan perusahaan menjadi lebih baik dimassa berikutnya.

## **b. Landasan Hukum dan Prinsip Analisis Laporan Keuangan**

Firman Allah yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan terdapat pada Al- Qur'an Surat An- Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>38</sup> S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 59

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An- Nisa: 58).<sup>39</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa amanah adalah setiap hal yang dipercayakan kepada seseorang dan diperintahkan untuk menyampikan dengan jujur kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini mengenai analisis laporan keuangan haruslah dilakukan secara sempurna, tidak dikurangi, dan tidak pula dicurangi, dalam ayat tersebut mengatakan bahwa Allah akan melihat dan mendengar meski manusia menyembunyikannya, maka dari itu dalam melakukan analisis laporan keuangan haruslah menjunjung tinggi jujur dan adil.

Prinsip-prinsip yang ada dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. *Credibility* (kredibilitas).

Kredibilitas merupakan suatu kondisi yang dapat dipercaya atau di pertanggung jawabkan. Dimana suatu informasi laporan keuangan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. *Transparency* (Transparansi)

Trnasparansi adalah memberikan informasi dengan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

---

<sup>39</sup> Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 87

### 3. *Accountability* (Akuntabilitas )

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### 4. *Reasonable* (masuk akal)

Tujuan harus realistik/reasonable, artinya harus masuk akal dan dapat disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya misalnya dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki, jika tidak sesuai maka sumberdaya akan terbuang dengan percuma.

### 5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

*Fairness* merupakan perlakuan yang adil berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, termasuk kesempatan yang sama dalam menerima hak, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Begitupun didalam analisis laporan keuangan perusahaan tidak ada pengecualian untuk tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya.

## c. Unsur-unsur Analisis Laporan Keuangan

Terdapat beberapa unsur yang ada pada analisis laporan keuangan sebagai berikut:

### 1. Neraca

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada periode waktu tertentu. Elemen-elemen yang terdapat

dalam neraca adalah aktiva, hutang dan modal. Aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang serta aktiva yang tidak berwujud lainnya. Sedangkan hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.<sup>40</sup>

## 2. Laba rugi

Laporan yang mengiktisarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama satu periode akuntansi, yang biasanya selama satu kuartal atau satu tahun. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu.

## 3. Rasio

Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa yang akan datang. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya.<sup>41</sup> Data pokok sebagai input dalam analisis rasio ini adalah laporan rugi-laba dan neraca perusahaan. Dengan

---

<sup>40</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi Pertama Cetakan Ketujuh*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 28

<sup>41</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, hlm. 104

kedua laporan ini akan dapat ditentukan sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini dapat digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan. Terdapat empat jenis rasio didalam analisis laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

a) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan).<sup>42</sup> Rasio likuiditas mempunyai beberapa jenis rasio yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukurnya yaitu diantaranya ada Rasio lancar (*Current Ratio*), Rasio sangat lancar (*Quick Ratio Atau Acid Test Ratio*), Rasio kas (*Cash Ratio*) dan Rasio perputaran kas.<sup>43</sup>

b) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas, menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan assets untuk memperoleh penjualan.<sup>44</sup> Beberapa contoh dari rasio aktivitas adalah rasio perputaran piutang dan rasio perputaran aktiva.

c) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas (*Leverage Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya

---

<sup>42</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, hlm.. 110

<sup>43</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, hlm. 139

<sup>44</sup> Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, Edisi 4*, ((Yogyakarta: BPFE,2001), hlm. 114

besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri.<sup>45</sup> Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan total aktiva dan menilai utang dengan ekuitas (total modal).

#### c. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan rentabilitas/profitabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah diterapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya. Beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan yaitu *Net profit margin*, *Return on investment (ROI)*, *Return on equity (ROE)* dan *Gross Profit Margin*.<sup>46</sup>

#### d. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Didalam analisis laporan keuangan terdapat beberapa tujuan sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;

---

<sup>45</sup> Sartono, *Manajemen Keuangan*, hlm. 113

<sup>46</sup> Sartono, *Manajemen Keuangan*, hlm. 114

<sup>47</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, hlm. 68



2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau tidak;
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

#### **4. Beban**

##### **a. Pengertian Beban**

Beban atau *expenses* ialah pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan pada suatu periode tertentu. Didalam laporan laba rugi beban dikurangkan pada pendapatan untuk memperoleh laba. Unsur-unsur beban ialah harga pokok penjualan, beban pemasaran, beban administrasi, beban bunga, dan beban pajak.<sup>48</sup>

Beban (*expenses*) merupakan biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis.<sup>49</sup>

Istilah beban dapat dinyatakan sebagai biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk

---

<sup>48</sup> Darsono Prawironegoro, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Diadit Media, 2005), hlm. 15

<sup>49</sup> Bastian bustami & Nurlela, *Akuntansi Biaya: Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 4

kegiatan masa berikutnya. Sementara yang dimaksud dengan biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa.<sup>50</sup>

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa beban merupakan pengorbanan untuk memperoleh pendapatan pada periode tertentu dan digunakan pada masa lalu untuk mendapatkan penghasilan yang diharapkan pada periode tertentu.

### b. Landasan Syari'ah Beban

Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai beban. Diantaranya yaitu terdapat pada Al- Qur'an dan Al- Hadits sebagai berikut:

#### 1. Al- Qur'an

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى

Apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya.

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ

(Tidak), Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. (QS An-Najm/ 53:24-25)<sup>51</sup>

Dari kedua ayat di atas, bila dihubungkan dengan beban perusahaan ialah jika perusahaan ingin mendapatkan apa yang dicita-citakannya maka perusahaan tersebut harus menunaikan kewajibannya. Kewajiban tersebut berupa beban yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan dan keberlangsungan perusahaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

<sup>50</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), hlm. 21

<sup>51</sup> Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 526

## 2. Hadits

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِيكِ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدَّ إِلَى مَنْ أَنْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Telah mengabarkan kepada kami (Muhammad bin Al 'Ala`) telah menceritakan kepada kami (Thalq bin Ghannam) dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu."<sup>52</sup>

Berdasarkan ayat hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa amanah harus dtunaikan kepada orang yang berhak menerimanya, di dalam penelitian ini amanah merupakan Beban yang harus dikeluarkan perusahaan agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan dari orang-orang yang berkaitan dengan perusahaan.

## 3. Kaidah Fiqih

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya”<sup>53</sup>

Dari kaidah fiqh di atas dapat dipahami bahwa jika perorangan atau sebuah perusahaan memiliki kewajiban maka kewajiban tersebut harus dipenuhi untuk menyempurnakan suatu tujuan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kewajiban perusahaan yaitu beban perusahaan yang harus segera ditunaikan kepada pihak terkait agar menyempurnakan tujuan perusahaan.

<sup>52</sup> HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani, *Al Irwaa' Jilid 5* (Mesir: Dar al-Maktabah, t.th), hlm, 381

<sup>53</sup> Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. (Jakarta: Kencana 2010) Cet. 3

### c. Penggolongan Pendapatan dan Beban

Penggolongan ialah penguraian dan penyusunan menenurut kesamaan dan perbedaan. Di dalam laporan laba rugi terdapat penggolongan pendapatan (*revenues*) dan beban (*expenses*) sebagai pengurangnya. Beberapa kategori pendapatan dan beban adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Pendapatan penjualan (*sales revenue*) yaitu total angka penjualan yang berhasil dilakukan perusahaan baik secara tunai maupun kredit;
- 2) Pendapatan jasa (*service revenue*) yaitu jumlah yang diperoleh dan dilaporkan sesuai penghasilan yang diterima perusahaan setelah selesai memberikan jasanya kepada pelanggan;
- 3) Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan diluar usaha pokoknya. Sebagai contoh pendapatan sewa atas aktiva yang disewakan kepada pelanggan.
- 4) Biaya harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) yaitu jumlah biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu pendapatan atau memproduksi barang.
- 5) Beban operasi (*operating expenses*) yaitu golongan biaya sehari-hari yang dikeluarkan dalam rangka mengoperasikan perusahaan,
- 6) Beban atau pendapatan lain-lain (*other expenses/ income*) yaitu beban atau pendapatan diluar operasi usaha seperti beban sewa atau pendapatan sewa (*rent expanses/ income*) dan penjualan aktiva tetap (*sale of plant assets*).

---

<sup>54</sup> Elvy M. Manurung. *Akuntansi Dasar (Untuk Pemula)*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.

- 7) Beban atau pendapatan luar biasa (*extraordinary item*) yaitu pos-pos luar biasa yang tidak pernah atau jarang sekali terjadi. Seperti kerugian akibat gempa bumi, tanah longsor atau bencana lain dan memenangkan undian.
- 8) Beban bunga (*interest expenses*) dan beban pajak (*tax expenses*) atau dalam konsep syari'ah tercantum beban zakat (*tithe expenses*) sebagai pengganti bunga. Beban ini merupakan golongan beban yang paling akhir dan diinformasikan secara terpisah untuk kepentingan perhitungan bunga/ zakat dan pajak yang harus dibayar.

#### **d. Penentuan Beban**

Untuk memperoleh penetapan laba yang wajar, maka dilakukan penentuan atas beban pada awal dan akhir periode yang bersangkutan. Secara umum beban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Beban yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan yaitu berupa beban yang harus dilaporkan dalam periode diakuinya pendapatan seperti harga pokok penjualan dan komisi penjualan.
- 2) Beban yang berhubungan dengan periode terjadinya yaitu beban yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan produk perusahaan. Pembebanan pada periode terjadinya dilakukan mengingat beban tersebut memberikan manfaat pada periode berjalan atau karena beban tersebut sudah tidak memberikan manfaat untuk masa-masa mendatang. Contohnya gaji pegawai, penyusutan aktiva tetap, pajak penghasilan, zakat dan sebagainya.

---

<sup>55</sup> Elvy M. Manurung. *Akuntansi Dasar(Untuk Pemula)*, hlm. 21

## 5. Beban Pemasaran

### a. Pengertian Beban Pemasaran

Beban pemasaran adalah semua biaya yang sejak produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut berubah kembali dalam bentuk uang tunai.<sup>56</sup> Biaya pemasaran juga dapat diartikan sebagai semua biaya yang telah terjadi dalam rangka memasarkan produk atau barang dagangan, dimana biaya tersebut timbul dari saat produk atau barang dagangan siap dijual sampai dengan diterimanya hasil penjualan menjadi kas.

Setiap perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk kegiatan memasarkan produk barang atau jasanya, biaya tersebut akan dicatat sebagai beban pemasaran dalam laporan laba rugi pada periode tertentu. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produknya dan mengembangkan perusahaan agar kehidupan perusahaan terus berlangsung.

Adapun pengertian pemasaran secara syari'ah adalah sebuah disiplin strategi bisnis yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu inisiator kepada *stakeholders*-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al- Qur'an dan Hadits.<sup>57</sup> Secara umum pemasaran Islami menjadi strategi bisnis yang memayungi seluruh aktivitas dalam perusahaan, meliputi seluruh proses, menciptakan, menawarkan,

---

<sup>56</sup> Mulyadi, *Akuntansi Biaya untuk Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 1991), hlm. 529

<sup>57</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 340

pertukaran nilai, dari produsen perusahaan, atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

### b. Landasan Syari'ah Beban Pemasaran

Menurut prinsip syari'ah, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan semangat beribadah kepada Allah serta menjunjung tinggi etika keislaman. Adapun salah-satu dasar hukum pemasaran terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits sebagai berikut:

#### 1. Al- Qur'an

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)<sup>58</sup>

Ayat di atas menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pemasaran berorientasi syari'ah, diantaranya menjelaskan kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh produk tidak diperbolehkan dengan cara batil, seperti dengan cara berbohong, menipu, merampok, dan korupsi. Adapun cara memperolehnya haruslah dengan cara suka sama suka diantara kedua belah pihak, artinya harus dilakukan dengan kesepakatan diantara dua belah pihak dengan cara pertukaran (barang atau jasa dari penjual dan uang dari pembeli).

<sup>58</sup> Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 65

## 2. Al- Hadits

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا رواه مسلم

Abdullah bin Mas'ud berkata: “Bersabda Rasulullah : Kalian harus jujur karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada jannah. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian dusta karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta sehingga ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta”. (HR Muslim no. 6586)<sup>59</sup>

Berdasarkan landasan Hadits di atas bahwa setiap orang harus jujur dalam melaksanakan hal apapun, termasuk dalam hal pemasaran. Di dalam pemasaran hendaknya berkata baik, bersikap santun, menjelaskan produk dengan sejelajelasnya dan menghindari tindakan penipuan dalam transaksi.

### c. Penentuan Beban Pemasaran dalam Sistem Keuangan

Prinsip pemasaran yang berakhlak sudah seharusnya kita terapkan di dalam perusahaan, karena akhir-akhir ini sering kita jumpai cara pemasaran yang tidak etis, curang dan tidak profesional. Kegiatan pemasaran haruslah dilakukan dengan beretika, realistis, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Pemilihan dasar pengukuran memerlukan analisis yang tepat. Tarif

<sup>59</sup> Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim, Jilid I*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Hadits Nomor 6586



akhir dalam menunjukkan biaya yang dapat diterima tergantung pada ketepatan atau keseimbangan dasar yang di pilih.<sup>60</sup>

Secara garis besar beban pemasaran dapat dibagi menjadi dua golongan,<sup>61</sup> yaitu :

1. Biaya untuk mendapatkan pesanan (*order getting costs*), yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah biaya gaji wiraniaga (*sales person*), komisi penjualan, advertensi dan biaya promosi.
2. Biaya untuk memenuhi pesanan (*order filling costs*), yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah biaya pergudangan, biaya pembungkus dan pengiriman, biaya angkutan serta biaya penagihan.

#### **d. Tujuan Beban Pemasaran dalam Sistem Keuangan**

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk dapat bersaing dipasar dan menghasilkan laba. Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut ialah dengan memasarkan produknya, atau yang sering disebut dengan pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu instrumen terpenting dalam dunia bisnis untuk mencapai target pasar. Pemasaran juga merupakan kunci dari kesuksesan bisnis di era milenium ini dan kini pemasaran dianggap sebagai alat pemenuhan kepuasan konsumen.

---

<sup>60</sup> Setiawan, Halim Hartono, Suhadak dan Nengah Sujana, *Analisis Biaya Pemasaran Sebagai Salah Satu Alat untuk Pengendalian Biaya Komersial*, (Vol. 3 No. 2, 2015), hlm.1-6

<sup>61</sup> Mulyadi. *Akuntansi Biaya*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009, hlm. 488

Menurut Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula didalam bukunya menjelaskan ada dua tujuan utama dari *Marketing Syari'ah* atau Pemasaran Syari'ah, yaitu:<sup>62</sup>

1. *Me-marketing*-kan syari'ah

*Me-marketing*-kan syari'ah adalah suatu kegiatan memasarkan barang atau jasa yang telah memiliki unsur syari'ah didalamnya. Perusahaan yang pengelolaannya berlandaskan syari'ah Islam dituntut untuk bisa bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat akan diferensiasi yang ditawarkan perusahaan berbasis syari'ah masih rendah, sehingga dibutuhkan suatu program pemasaran yang komprehensif salah satunya mengenai *value proposition* produk-produk syari'ah yang nantinya diharapkan dapat diterima dengan baik oleh konsumen.

2. Men-syari'ah-kan *Marketing*

Pemahaman yang keliru mengenai peran pemasaran, dibutuhkan suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas. Syari'ah islam sebagai syari'ah yang utuh dan komprehensif mencakup nilai-nilai tersebut, sehingga diharapkan akan mendukung peran pemasaran untuk menjaga integritas, identitas dan *image* perusahaan. Selain itu, dengan mensyari'ahkan *marketing* sebuah perusahaan tidak akan serta merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi semata, karena pemasar juga akan berusaha untuk menciptakan dan menawarkan bahkan dapat merubah suatu *values* kepada para *stakeholder* utamanya. Konsep *marketing* syari'ah yang ditawarkan dapat

---

<sup>62</sup> Muhammad Sulaiman dan Aizuddinnur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* (PT Mizan Publika: Jakarta Selatan, 2010), hlm. 183

memperbaiki citra pemasar yang selama ini diinterpretasikan buruk oleh konsumen, perbaikan citra akan berdampak positif terhadap perusahaan dengan mendatangkan konsumen yang loyal dan dapat meningkatkan profit.

## 6. Beban Umum dan Administrasi

### a. Pengertian Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan biaya administrasi merupakan biaya yang terjadi dibagian umum dan administrasi umum. Bagian ini pada umumnya merupakan bagian yang terdiri dari beraneka ragam pekerjaan (selain pabrik dan penjualan) dan banyak yang sering disebut bagian umum. Sesuai dengan namanya yaitu bagian administrasi umum maka bagian ini mengurus masalah masalah administrasi perusahaan serta hal lainnya yang berhubungan dengan kepentingan secara umum.<sup>63</sup> Biaya administrasi dan umum adalah *Budget* yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu (bulan ke bulan) selama periode tertentu yang akan datang.

Beban administrasi ialah semua biaya yang terdapat serta terjadi didalam lingkungan bagian (kantor) administrasi umum.<sup>64</sup> Meliputi semua biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi umum. Biaya-biaya tersebut digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya

---

<sup>63</sup> Tendi haruman & sri rahayu, *penyusunan Anggaran Perusahaan*, (Bandung: Graha ilmu, 2007), hlm. 109

<sup>64</sup> M munandar, *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja, Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, 2007), hlm. 171

ialah biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi personalia dan bagian humas, biaya pemeriksaan dan biaya fotokopi.<sup>65</sup>

Ada beberapa bagian yang termasuk kedalam bagian beban biaya umum dan administrasi, yang biasanya dipergunakan oleh perusahaan, antara lain :

1. Bagian sekretariat (tata usaha), yang menangani urusan surat menyurat dan arsip;
2. Bagian keuangan (pembukuan), yang menangani urusan pembukuan akuntansi dan masalah keuangan;
3. Bagian perlengkapan (rumah tangga), yang menangani urusan perlengkapan-perengkapan dan keperluan-keperluan kantor administrasi;
4. Bagian personalia, yang menangani urusan-urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah personalia;
5. Bagian hubungan masyarakat (humas), yang menangani urusan-urusan yang berhubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan.

#### **b. Landasan Syari'ah Beban Umum dan Administrasi**

Adapun yang melandasi beban umum dan administrasi terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, diantaranya:

1. Al-Qur'an

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

<sup>65</sup> Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2014), hlm. 65

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS: Az- Zukhruf 32)<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan landasan hukum diatas maka dapat dirumuskan bahwa karena didalam beban umum dan administrasi ini berhubungan dengan kewajiban perusahaan terhadap pegawainya maka jangan berbuat dzalim terhadap pegawai dan berilah upah yang setimpal. Pendzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapat balasan, itu sama saja dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.

## 2. Al- Hadits

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi Muhammad Saw bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)<sup>67</sup>

Didalam beban Umum dan Admnistrasi terdapat beban yang berakitan dengan upah atau gaji orang-orang yang bekerja pada perusahaan maka kaitan dan maksud dari hadits ini ialah perusahaan harus segera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan.

<sup>66</sup> Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 491

<sup>67</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm. 50

### c. Penentuan Beban Umum dan Administrasi Pemasaran dalam Sistem

#### Keuangan

Biaya- biaya yang dikategorikan sebagai biaya administrasi dan umum adalah semua yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya, selain biaya- biaya pabrik dan distribusi. Pada perusahaan-perusahaan yang relatif besar, biaya administrasi timbul pada bagian-bagian administrasi, pembukuan, perbekalan dan bagian staf. Sehingga anggaran biaya administrasi secara keseluruhan, mencakup<sup>68</sup>

1. Biaya untuk direksi dan stafnya, termasuk gaji, bonus tahunan, biaya perjalanan, biaya representasi dan administrasi kantor direksi.
2. Biaya departemen keuangan yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan dan biaya administrasi departemen, biaya penyusutan aktiva tetap.
3. Biaya departemen umum dan administrasi yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, biaya komunikasi (telephon, telegram, telex), asuransi pegawai, penyusutan macam-macam aktiva tetap, listrik dan air.

Agar penentuan beban biaya umum dan administrasi dapat berjalan dengan baik dan akurat, maka diperlukan data, informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan didalam beban biaya umum dan administrasi antara lain :

1. Biaya penjualan, khususnya tentang jumlah (kualitas) dari masing-masing jenis barang yang akan dijual dari waktu ke waktu (bulan ke bulan) yang

---

<sup>68</sup> Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri, *Anggaran Perusahaan, Edisi Ketiga*, (Yogyakarta; BPFU UGM, 2004), hlm. 317

akan datang. Walaupun secara tidak langsung *budget* penjualan mempengaruhi besar kecilnya biaya administrasi.

2. *Budget* unit yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah (kuantitas) dan dari masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu (bulan ke bulan) selama periode tertentu yang akan datang. Jumlah produksi yang besar di samping akan meningkatkan kesibukan-kesibukan di bagian produksi, yang secara tidak langsung akan mengakibatkan pula peningkatan kesibukan di bagian administrasi.
3. Berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang berkaitan dengan biaya administrasi dan umum (misalnya standar pemakaian bahan-bahan, standar pemakaian listrik dan sebagainya).
4. Sistem pembayaran upah (gaji) yang dipakai oleh perusahaan, khususnya yang dibayarkan kepada para karyawan di bagian administrasi.
5. Metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada dibagian lingkungan administrasi.
6. Metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan (biaya bersama), menjadi beberapa kelompok biaya sesuai dengan tempat dimana biaya itu terdapat atau terjadi.

#### **d. Tujuan Beban Biaya Administrasi dan Umum dalam dalam Sistem**

##### **Keuangan**

Secara umum biaya administrasi dan umum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman kerja, yang memberikan arah serta sekaligus target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang.
2. Sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, untuk membantu mengkoordinir sumber daya manusia dengan perusahaan.
3. Sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja, sebagai alat yang menjadi alat tolak ukur, alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan.

Sedangkan secara khusus, biaya administrasi bertujuan sebagai dasar untuk penyusunan budget kas, karena sebagian dari biaya administrasi memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas.<sup>69</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

#### **7. Laba**

##### **a. Pengertian Laba**

Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode,

---

<sup>69</sup> M. munandar, *Budgeting: Perencanaan Kerja*, hlm. 172



kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi pemilik dan pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya.<sup>70</sup>

Didalam laba ada yang dinamakan dengan laba tahun berjalan atau yang sering disebut dengan laba bersih. Laba tahun berjalan atau laba bersih adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel yang dikurangkan dari penerimaan perusahaan, kelebihan pendapatan (*income*) di atas pengeluaran perusahaan.<sup>71</sup>

Hal ini berbeda dengan laba kotor yang biasanya mengacu pada selisih antara penjualan dan biaya langsung produk atau jasa yang dijual (juga disebut sebagai *margin* kotor atau *margin* laba kotor) dan tentunya sebelum dikurangi biaya operasi atau biaya overhead. Laba bersih biasanya mengacu pada angka laba sebelum dikurangi pajak perusahaan, dalam hal ini istilah yang sering digunakan adalah laba bersih sebelum pajak *Earning Before Tax* (EBT). Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian dividen.

Laba seringkali dipandang sebagai tolak ukur untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan. Laba terdiri dari pendapatan perusahaan dikurangi biaya yang dapat dijadikan suatu alat pengambilan keputusan perusahaan yang dapat membantu dalam prediksi peristiwa ekonomi di masa yang akan datang.

Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari

---

<sup>70</sup> Zaki Baridwan, *Akuntansi Keuangan edisi 5*, (Yogyakarta: Erlangga, 1992), hlm. 55

<sup>71</sup> Sastradipoera Komaruddin, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan*, (Bandung: Kappa-Sigma, 2004), hlm. 270

hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil operasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan manajemen atas sumberdaya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan suatu usaha.<sup>72</sup>

Suatu perusahaan yang secara konsisten menghasilkan laba dapat berbisnis, tumbuh, dan meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang terus mengalami kerugian akhirnya akan hilang dari dunia bisnis. Oleh karenanya, laba sangatlah berperan penting dalam suatu roda bisnis perusahaan.

Laba dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang sifatnya mendukung peningkatan laba, maupun yang sifatnya justru mengurangi laba. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laba diantaranya adalah Penjualan, beban pokok penjualan, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum.<sup>73</sup>

## b. Landasan Syari'ah Laba

Dalam ekonomi Islam pengambilan keuntungan harus memenuhi unsur adil, sebagaimana tertuang didalam Al- Qur'an an Hadits sebagai berikut:

### 1. Al- Qur'an

وَالِى مَدِيْنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا  
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۗ اِنِّىْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ

<sup>72</sup> Hapsari Ayu Epri, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba*, skripsi (Semarang, Universitas Dipenogoro, 2017)

<sup>73</sup> Hartanto, *Akuntansi Keuangan Menengah Buku 1*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), hlm. 54-55

Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)" (QS. Hud: 84)<sup>74</sup>

## 2. Al- Hadits

مؤمن مثل التاجر لايسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله كذلك المؤمن لا تسلم له نوافله  
حتى تسلم فرائضه

Seorang mukmin bagaikan seorang pedagang, dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga, seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>75</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa keuntungan atau laba terhadap suatu usaha akan didapat setelah modal pokoknya kembali. Keuntungan atau laba dalam perspektif Islam mengharuskan dengan prinsip syari'ah dan terhindar dari riba, maisyir dan gharar. Unsur halal dalam mencari keuntungan sangat diwajibkan dalam Islam, karena setiap keuntungan yang dicari dengan cara tidak halal sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri.

## 3. Kaidah Ushul Fiqh

الأصل في الشرط في المعاملات الجلب والإباحة إلا بدليل  
Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya.

Dari kaidah ushul fiqh diatas dijelaskan bahwa asal dari syarat-syarat muamalah adalah halal. Berdasarkan landasan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa didalam menjalankan roda perekonomian khususnya didalam mendapatkan

<sup>74</sup> Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 231

<sup>75</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 80-81

pendapatan harus bersifat halal, tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah disepakati karena hal tersebut dapat menjadi dzalim dan merugikan pihak lain.

### c. Jenis- Jenis Laba

Laba merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan, laba terdiri atas beberapa jenis:<sup>76</sup>

1. Laba kotor, adalah selisish dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan.
2. Laba operasional, adalah merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal.
3. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT (*Earning Before Tax*), laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumla ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.
4. Laba setelah pajak atau laba bersih, adalah laba yang dikurangi pajak. Laba dipindahkan dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham.

---

<sup>76</sup> Ahmad ifham sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Utama 201), hlm. 446

#### **d. Unsur- Unsur Laba**

Ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam laba diantaranya sebagai berikut.<sup>77</sup>

##### **1. Pendapatan**

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Pendapatan berasal dari peningkatan pelayanan pada nasabah atau mitra kerja yang mana tujuan akhirnya adalah bagaimana memaksimalkan profit dan nilai perusahaan.

##### **2. Beban**

Beban adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivitas operasi. Beban juga merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menyangkut pembagian kepada penanam modal.

##### **3. Biaya**

Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban, tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan laba-rugi untuk menentukan laba periode.

---

<sup>77</sup> Chariri dan Ghazali, *Teori Akuntansi*, (Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, 2001), hlm. 23

#### 4. Untung-rugi

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi incidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik.

#### 5. Penghasilan

Penghasilan adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam PSAK Nomormor 23 Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) paragraf 70 menyatakan bahwa penghasilan (*income*) adalah arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

#### e. Cara Menghitung Laba

Labanya tahun berjalan atau laba bersih (*net income*) merupakan angka terakhir pada laporan laba rugi. Laba bersih merupakan laba kotor dikurangi oleh semua biaya yang dikeluarkan seperti biaya operasional dan biaya *non* operasional lalu ditambah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan *non* operasional jika ada, seperti pendapatan bunga atau pendapatan hasil dari penjualan aktiva tetap perusahaan.

Biaya operasional contohnya adalah biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya penyusutan. Sedangkan biaya *non* operasional contohnya adalah biaya

bunga (*interest*), dan pajak (*tax*). Terdapat dua rumus perhitungan laba bersih. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Perhitungan laba bersih cara satu

$$\text{LABA BERSIH} = \text{Laba kotor} - \text{Beban usaha}$$

$$\text{BEBAN USAHA} = \text{Beban operasional} + \text{Beban non Operasional}$$

2. Perhitungan laba bersih cara dua

$$\text{LABA BERSIH} = \text{EBT} - \text{Beban Pajak}$$

$$\text{EBT} = \text{EBITDA} - \text{Beban Bunga} + \text{Pendapatan Bunga}$$

$$\text{EBITDA} = \text{Laba Kotor} - \text{Biaya operasional Bunga}$$

Keterangan:

EBITDA = *Earning before Interest, Tax, Depreciation and Amortation* (Laba sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan dan Amortisasi).

EBIT = *Earning before Interest and Tax* (Laba sebelum Bunga dan Pajak).

EBT = *Earning before Tax* (Laba sebelum Pajak)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, dari kajian pustaka tersebut dapat menjelaskan teori dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang ditetapkan. Berikut ini penjelasan dari kerangka berpikir dalam penelitian yang dilakukan diantaranya mengenai laba dan beban.

---

<sup>78</sup> Eka Nicho, *Rumus Laba Bersih*, dalam <http://nichonotes/rumus-laba-bersih.html>. diakses tanggal 9 Oktober 2018

Laba merupakan selisih lebih dari pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha yang memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Pada umumnya, ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan atau bank adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan.<sup>79</sup> Besar kecilnya laba akan terlihat setelah pendapatan dikurangi oleh beban.

Beban (*expenses*) merupakan biaya yang dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan (*revenues*) dalam suatu periode akuntansi tertentu. Didalam laporan laba-rugi, beban digunakan sebagai pengurang.<sup>80</sup> Sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa dalam akuntansi keuangan biaya yang dikeluarkan atau dikonsumsi dalam rangka untuk memperoleh pendapatan dan beban merupakan pengurang dari pendapatan untuk mendapatkan laba, jika beban yang dikeluarkan cukup besar maka akan mempengaruhi laba yang didapat oleh perusahaan.

Jika pendapatan usaha yang didapat perusahaan mengalami kenaikan, otomatis laba bersih perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan. Dari kondisi tersebut diharapkan manajemen tetap mempertahankan kinerjanya dengan baik agar pendapatan yang didapat terus meningkat. Hasil survei tersebut didukung oleh penelitian Siregar (2006) menyatakan bahwa semakin besar pendapatan usaha yang didapat perusahaan maka akan semakin besar laba keuntungan yang didapat oleh perusahaan sebaliknya jika perusahaan yang

---

<sup>79</sup> Acep Faizal R, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Laba Bersih Di PT Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi: UIN Bandung, 2017), hlm. 155

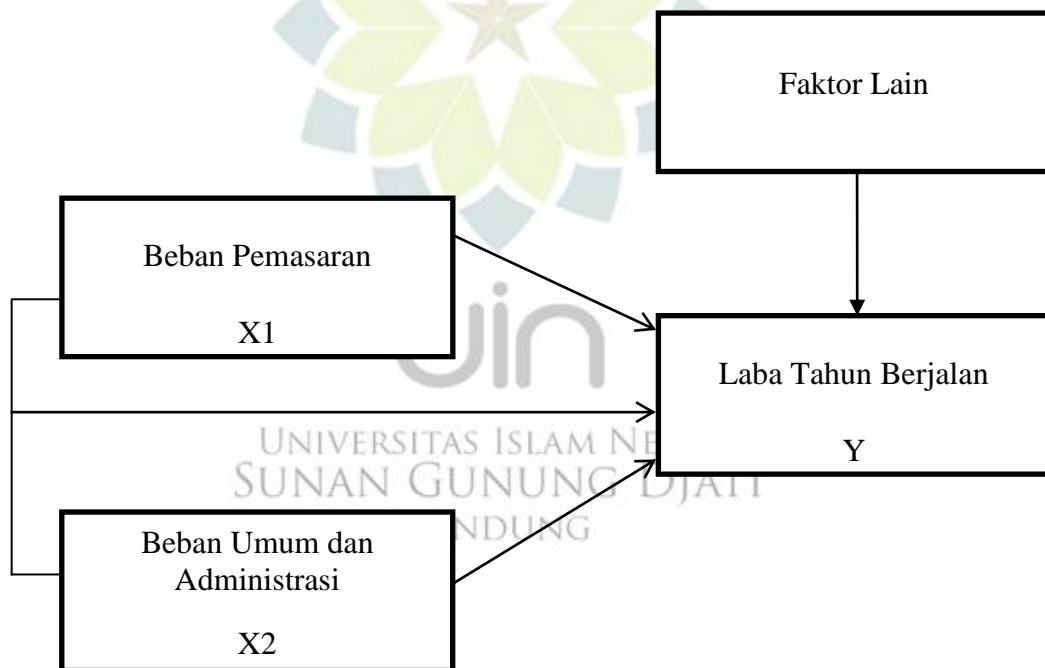
<sup>80</sup> R.A. Suoriyono, *Akuntansi Manajemen I: Konsep Dasar Akuntansi Manajemen dan Proses Perencanaan*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 186



bebannya semakin besar maka akan memperkecil keuntungan atau laba yang didapat oleh perusahaan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini di ilustrasikan kedalam gambar, dimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, baik itu beban pemasaran terhadap laba tahun berjalan maupun beban umum dan administrasi terhadap laba tahun berjalan. Berikut ini peneliti ilustrasikan dalam gambar kerangka berpikir berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Kerangka berpikir diatas menunjukkan hubungan antar variabel. Beban Pemasaran memiliki kaitan dengan laba tahun berjalan. Ketika beban pemasaran semakin besar, maka laba akan semakin menurun begitupun sebaliknya. Hal yang sama juga terdapat pada hubungan beban umum dan administrasi, yakni ketika

beban umum dan administrasi naik maka laba tahun berjalan akan menurun dan juga sebaliknya. Jadi pada intinya hubungan beban pemasaran, beban umum dan administrasi dan laba tahun berjalan bersifat negatif.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ho : Beban Pemasaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Tahun Berjalan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Unit Syari'ah.  
Ha : Beban Pemasaran secara parsial berpengaruh terhadap Laba Tahun Berjalan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Unit Syari'ah.
2. Ho : Beban Umum dan Administrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Tahun Berjalan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Unit Syari'ah.  
Ha : Beban Umum dan Administrasi secara parsial berpengaruh terhadap Laba Tahun Berjalan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Unit Syari'ah.
3. Ho : Beban Pemasaran dan Beban Beban Umum dan Administrasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap Laba Tahun Berjalan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Unit Syari'ah.  
Ha : Beban Pemasaran dan Beban Umum dan Administrasi secara simultan berpengaruh terhadap Laba Tahun Berjalan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Unit Syari'ah.